

Nomor SOP	Surat Masuk
Tanggal Pembuatan	Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	GAMAR PENGKADAN

H. TABRANI, S.A.P MP: 19661101 198512 1 001

Nama SOP SURAT MASUR

	Nama SOP	SURAT MASUK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSAN	NA	
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	1. Pendidikan Minimal SMA		
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan	2. Memahami struktur Organ	nisasi Kecamatan	
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang	3. Memahami Konsep Pelay	anan Surat Masuk	
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	4.Memahami Konsep dasar	Operasional Komputer	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN		
	1. Buku Agenda / Buku Reg	ister	
	2. Komputer		
	3. Kertas Kerja		
	4. Pulpen		
PERINGATAN	PENDATAAN DAN PENC	ACATAN	
1. Jika Prosedur tidak dipenuhi maka surat masuk tidak akan ditindaklanjuti	1. Pencatatan di buku regist	er	
	2. Input data		

#### PELAYANAN SURAT MASUK

				PELAKSA			N	MUTU BAK	U	Ket
No	URAIAN	Camat	Sekcam	Unit Pengelola	Kassubag Personil dan Umum	Front Office	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, mengendalikan, mengagendakan serta mendistribusikan surat masuk ke unit pengelolah					Mulai	<ul><li>Dokumen surat masuk</li><li>Buku agenda</li><li>Pulpen</li></ul>	4 menit		
2	Menerima, menelaah dan memberi lembar disposisi surat				-	•	<ul><li>Pulpen</li><li>Kertas Kerja</li><li>Buku Agenda surat masuk</li></ul>	2 menit	Dokumen Yang sudah diagendakan	
3	Meneliti dan menelaah surat masuk apabila memerlukan pertimbangan pimpinan, maka surat diteruskan ke camat. Jika tidak surat masuk disposisikan ke unit pengelola						- Kertas - pulpen	3 menit	Dokumen yang sudah ditelaah dan didisposisikan oleh sekcam	
4	Meneliti, Menelaah dan Memberikan arahan ke Sekretaris Camat						- Kertas - Pulpen	3 menit	Dokumen yang sudah ditelaah dan didisposisikan oleh camat	
5	Menindaklanjuti Surat Masuk berdasarkan arahan camat dan melanjutkan ke Unit Pengelola		_	1			- Kertas - Pulpen	3 menit	Dokumen berdasarkan arahan Camat	

6	Menindaklanjuti surat masuk berdasarkan arahan Sekcam dan melanjutkan ke Unit Kearsipan	- Kertas - Pulper		
7	Pengarsipan surat Masuk		Dokumen Asli	



Nomor SOP	Surat Keluar
Tanggal Pembuatan	Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	CAMAT PENGKADAN

NIP. 19661101 198512 1 001

CAMAT PENGKADAN

KECAMATAN TWA

PENGKADAN

TARPANI SAR

Nama SOP

SURAT KELUAR

	Nama SOP	SURAI KELUAK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSAI	NA	
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	1. Pendidikan Minimal SMA	$\Lambda$	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan	2. Memahami struktur Organ	nisasi Kecamatan	
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang	3. Memahami Konsep Pelay	anan Surat Keluar	
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	4. Memahami Konsep dasar	Operasional Komputer	
	_		
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN		
	1. Buku Agenda / Buku Register		
	2. Komputer		
	3. Kertas Kerja		
	4. Pulpen		
PERINGATAN	PENDATAAN DAN PENC	ACATAN	
1. Jika Prosedur tidak dipenuhi maka Surat Keluar tidak akan ditindaklanjuti dan	1. Pencatatan di buku regist	er	
di proses	2. Input data		

#### PELAYANAN SURAT KELUAR

No	LIDALAN	URAIAN PELAKSANA MUTU BAKU			AKU	Ket			
NO	UKAIAN	Camat	Sekcam	Unit Pengelola	Front Office	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membuat dan Menyampaikan Konsep		<b>,</b>	Mulai			2 menit	Draf dokumen	
2	Meneliti dan Menelaah surat keluar. Apabila tidak sependapat dikembalikan ke unit pengelola. Jika disetujui ditindak lanjuti ke Camat					- Pulpen - Kertas Kerja	4 menit	Draf dokumen yang sudah diparaf	
3	Membaca, memeriksa, menyetujui atau menolak konsep surat keluar	<b>→</b>				- Kertas - pulpen	4 menit	Draf dokumen yang sudah ditandatangani	
4	Memeriksa kelengkapan dan memperbanyak surat berdasarkan arahan camat		•			- Kertas - Pulpen	5 menit	Dokumen diperbanyak	
5	Mencatat, Mengagendakan dan Mengirim Surat Keluar				•	<ul><li>Kertas</li><li>Pulpen</li><li>Buku Agenda Keluar</li></ul>	5 menit	Dokumen Siap Kirim	



Nomor SOP	Surat Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan
Tanggal Pembuatan	Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	

Disahkan Oleh

CAMAT PENGKADAN

KECAMATAN

PENGKADAN

NIP. 19661101 198512 1 001

Nama SOP SURAT REKOMENDASI IZIN USAHA PERDAGANGAN

3. Surat Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi 1. Pendidikan Minimal SMA Pelayanan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 2. Memahami struktur Organisasi Kecamatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 3. Memahami Konsep Dasar Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan 3. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelayanan 4. Memahami Konsep dasar operasional Komputer Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi **KETERKAITAN** PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. SOP Surat Masuk 1. Buku Agenda / Buku Register 2. SOP Surat Izin Tempat Usaha 2. Komputer 3. Printer 3. Desa 4. Kertas Kerja 5. Pulpen 6. Cap / Stempel **PERINGATAN** PENDATAAN DAN PENCACATAN 1. Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi, dokumen tidak akan diproses 1. Pencatatan di buku register

2. Input data

#### SURAT REKOMENDASI IZIN USAHA PERDAGANGAN

				PELAKSA	NA		MU	TU BAKU		Ket
No	URAIAN	Camat	Sekcam	Kasi Ekonbang	Operator Pelayanan	Front Office	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, mengecek, menolak apabila persyaratan belum lengkap, mengisi formulir serta mengagendakan surat masuk berdasarkan Pelayanan Perzinan, Non Perizinan dan Persuratan.					Mulai	<ul> <li>Surat rekomendasi dari desa beserta skets wilayah</li> <li>Fotocopy sertifikat tanah</li> <li>Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)</li> <li>Fotocopy KTP</li> </ul>	5 menit	Draf dokumen	
2	Memeriksa dan menverifikasi dokumen			•			- Pulpen - Kertas Kerja	3 menit	Draf dokumen rekomendasi izin usaha perdagangan	
3	Pengetikan Surat rekomendasi izin usaha perdagangan						- Kertas - Pulpen - Komputer/laptop - Printer	5 menit	Dokumen yang sudah diketik	
4	Memeriksa, memverifikasi dan memberi paraf			-			- Kertas - Pulpen	2 menit	Dokumen yang sudah diberi paraf	
5	Memverifikasi dan memberi paraf						- Kertas - Pulpen	2 menit	Dokumen yang sudah diverifikasi dan diberi paraf	

6	Penandatangan Surat Rekomendasi oleh Camat	1		- Kertas - Pulpen	2 menit	Dokumen yang sudah ditandatangani	
7	Pencatatan dan registrasi dalam buku agenda surat keluar sekaligus penyerahan berkas kepada pemohon	1	<b></b>	<ul> <li>Buku agenda dan register</li> <li>Kertas</li> <li>Pulpen</li> <li>Cap/stempel</li> </ul>	2 menit	Dokumen surat rekomendasi izin usaha perdagangan	



Nomor SOP	Pembuatan Kartu Keluarga
Tanggal Pembuatan	Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanagal Danagashan	

Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh

ERINTACIANTAT PENGKADAN

**3. 19661101 198512 1 001** 

Nama SOP

	Nama SOP	PEMBUATAN KAKTU KELUAKGA			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	1. Pendidikan Minimal SMA	A			
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan	2. Memahami struktur Orga	nisasi Kecamatan			
3. Peraturan Daerah Kabuapetn Kapuas Hulu No.8 tahun 2010 Tentang	3. Memahami Konsep dasar	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga			
Administrasi Kependudukan	4. Memahami Konsep dasar	operasional Komputer			
	_				
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENG	KAPAN			
1. SOP Surat Masuk	1. Buku Agenda / Buku Reg	ister			
2. Desa	2. Komputer				
	3. Printer				
	4. Kertas Kerja				
	5. Pulpen				
	6. Cap / Stempel				
PERINGATAN	PENDATAAN DAN PENC	ACATAN			
1. Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi, dokumen tidak akan diproses	1. Pencatatan di Buku regis	ter			
	2. Input data				
	3. Pembuatan Kartu Keluar	ga			
Administrasi Kependudukan  KETERKAITAN  1. SOP Surat Masuk 2. Desa  PERINGATAN	4. Memahami Konsep dasar  PERALATAN / PERLENG  1. Buku Agenda / Buku Reg  2. Komputer  3. Printer  4. Kertas Kerja  5. Pulpen  6. Cap / Stempel  PENDATAAN DAN PENC  1. Pencatatan di Buku regis  2. Input data	operasional Komputer  KAPAN ister  ACATAN ter			

#### PEMBUATAN KARTU KELUARGA

				PELAKSA	NA		MUT	TU BAKU		Ket
No	URAIAN	Camat	Sekcam	Kasi Pemerintahan	Operator Pelayanan	Front Office	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, mengecek, menolak apabila persyaratan belum lengkap, mengisi formulir serta mengagendakan surat masuk berdasarkan Pelayanan Perzinan, Non Perizinan dan Persuratan.					Mulai	<ul> <li>Surat Pengantar dari desa</li> <li>Fotocopy Ijazah</li> <li>Fotocopy Akta Kelahiran / surat keterangan kelahiran</li> </ul>	5 menit	Draf dokumen	
2	Memeriksa dan menverifikasi dokumen			<b>←</b>			- Pulpen - Kertas Kerja	3 menit	Draf dokumen peembuatan Kartu Keluarga	
3	Pengetikan data pembuatan Kartu Keluarga						<ul><li>Kertas</li><li>Pulpen</li><li>Komputer/laptop</li><li>Printer</li></ul>	5 menit	Dokumen yang sudah diketik	
4	Memeriksa, memverifikasi dan memberi paraf			<b>←</b>			<ul><li>Kertas</li><li>Pulpen</li><li>Cap / stempel</li></ul>	2 menit	Dokumen yang sudah diberi paraf	
5	Pencatatan dalam buku agenda sekaligus penyerahan berkas kartu keluarga kepada pemohon					•	<ul><li>Kertas</li><li>Pulpen</li><li>Buku Agenda</li></ul>	2 menit	Dokumen Kartu Keluarga	



Nomor SOP	Surat Rekomendasi Izin Keramaian
Tanggal Pembuatan	Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	

EAMAT PENGKADAN Disahkan Oleh

> 19661101 198512 1 001 SURAT REKOMENDASI IZIN KERAMAIAN

Nama SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Pendidikan Minimal SMA
2. Memahami struktur Organisasi Kecamatan
3. Memahami Konsep Dasar Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Keramaian
4. Memahami Konsep dasar operasional Komputer
PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Buku Agenda / Buku Register
2. Komputer
3. Printer
4. Kertas Kerja
5. Pulpen
6. Cap / Stempel
PENDATAAN DAN PENCACATAN
Pencatatan di buku register
2. Input data
3. Surat Rekomendasi Izin Keramaian

#### SURAT REKOMENDASI IZIN KERAMAIAN

				PELAKSA	NA		MU	TU BAKU		Ket
No	URAIAN	Camat	Sekcam	Kasi Trantibum	Operator Pelayanan	Front Office	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, mengecek, menolak apabila persyaratan belum lengkap, mengisi formulir serta mengagendakan surat masuk berdasarkan Pelayanan Perzinan, Non Perizinan dan Persuratan.					Mulai	<ul><li>Surat pengantar dari desa</li><li>Fotocopy KTP yang bersangkutan</li></ul>	2 menit	Draf dokumen	
2	Memeriksa dan menverifikasi dokumen						<ul><li>Pulpen</li><li>Kertas Kerja</li></ul>	3 menit	Draf dokumen rekomendasi izin keramaian	
3	Pengetikan Surat rekomendasi izin keramaian			,			<ul><li>Kertas</li><li>Pulpen</li><li>Komputer/laptop</li><li>Printer</li></ul>	5 menit	Dokumen yang sudah diketik	
4	Memeriksa, memverifikasi dan memberi paraf						- Kertas - Pulpen	2 menit	Dokumen yang sudah diberi paraf	
5	Memverifikasi dan memberi paraf						- Kertas - Pulpen	2 menit	Dokumen yang sudah diverifikasi dan diberi paraf	
6	Penandatangan Surat Rekomendasi oleh Camat	<u> </u>					- Kertas - Pulpen	2 menit	Dokumen yang sudah ditandatangani	

	Pencatatan dan registrasi dalam buku agenda surat keluar sekaligus penyerahan berkas kepada pemohon	1			<b></b>		- - -	Buku agenda dan register Kertas Pulpen Cap/stempel	2 menit	Dokumen surat rekomendasi izin keramaian	
--	--	---	--	--	---------	--	-------------	--	---------	--	--



Nomor SOP	Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan
Tanggal Pembuatan	Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	

Disahkan Oleh

RINTARCAMAT PENGKADAN

MIP, 19661101 198512 1 001

Nama SOP

SURAT REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN

	DANGUNAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	1. Pendidikan Minimal SMA
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan	2. Memahami struktur Organisasi Kecamatan
3. Peraturan Daerah Kabuapetn Kapuas Hulu No.9 tahun 2011 Tentang	3. Memahami Konsep Dasar Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan
Bangunan Gedung	4. Memahami Konsep dasar operasional Komputer
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang	
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk	1. Buku Agenda / Buku Register
2. Desa	2. Komputer
	3. Printer
	4. Kertas Kerja
	5. Pulpen
	6. Cap / Stempel
PERINGATAN	PENDATAAN DAN PENCACATAN
1. Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi, dokumen tidak akan diproses	1. Pencatatan di Buku register
•	2. Input data
	3. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan

#### SURAT REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

				PELAKSA	NA		MU'	TU BAKU		Ket
No	URAIAN	Camat	Sekcam	Kasi Ekonbang	Operator Pelayanan	Front Office	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, mengecek, menolak apabila persyaratan belum lengkap, mengisi formulir serta mengagendakan surat masuk berdasarkan Pelayanan Perzinan, Non Perizinan dan Persuratan.					Mulai	<ul> <li>Surat rekomendasi dari desa beserta skets wilayah</li> <li>Bukti Kepemilikan /Sertifikat tanah</li> <li>Fotocopy KTP</li> </ul>	5 menit	Draf dokumen	
2	Memeriksa dan menverifikasi dokumen						- Pulpen - Kertas Kerja	3 menit	Draf dokumen rekomendasi izin mendirikan bangunan	
3	Pengetikan Surat rekomendasi izin mendirikan bangunan						<ul><li>Kertas</li><li>Pulpen</li><li>Komputer/laptop</li><li>Printer</li></ul>	5 menit	Dokumen yang sudah diketik	
4	Memeriksa, memverifikasi dan memberi paraf			<b>□</b>			- Kertas - Pulpen	2 menit	Dokumen yang sudah diberi paraf	
5	Memverifikasi dan memberi paraf						- Kertas - Pulpen	2 menit	Dokumen yang sudah diverifikasi dan diberi paraf	
6	Penandatangan Surat Rekomendasi oleh Camat	1					- Kertas - Pulpen	2 menit	Dokumen yang sudah ditandatangani	

Pencatatan dan registrasi dalam buku agenda surat keluar sekaligus penyerahan dokumen kepada pemohon	1		<b>→</b>	<ul><li>Buku agenda dan register</li><li>Kertas</li><li>Pulpen</li><li>Cap/stempel</li></ul>	2 menit	Dokumen surat rekomendasi izin mendirkan bangunan
---	---	--	----------	--	---------	--





### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN PENGKADAN

**ALAMAT : JALAN LINTAS SELATAN KM.105 MARTADANA 78759** 

EMAL: kantorcamatpengkadan@Gmail.com



#### PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN PENGKADAN

TANGGAL EVEKTIF DI SAHKAN OLEH	NTAH KASCAMAT PENGKADAN	
TANGGAL REVISI		
TANHGAL PEMBUATAN	: 06 Februari 2024	
NOMOR SOP	: 100.3.6 / 16 / KEC.PKD / 2024	

H. TABRANI,S.A.P.

19661101 198512 1 001

PENYUSUN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

ASAR HUKUM	<b>KUALIFIKASI UTAMA</b>

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kecamatan
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 4. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
- 5. Permenpan & Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- 1.Mengetahui dan Memiliki Wewenang Dalam Membuat dan menyusun RENSTRA SKPD
- 2.Memiliki kemampuan Untuk Menyusun dan Merencanakan Program Dan Kegiatan SKPD Priode 5 Tahun Ke Depan
- 3. Menguasai Program Komputer

NAMA SOP AP

#### KETERKAITAN PERLENGKAPAN

- 1.SOP Pengurusan Surat Keluar
- 2.SOP Penyusunan Renstra
- 3.SOP Pengarsipan

**PERINGATAN** 

- 1. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell)
- 2. Printer
- 3. Kertas HVS

#### PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Dokumen Renja

#### SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

			PELAKSANAAN			ML	KETERANGAN		
NO	AKTIVITAS	CAMAT	SEKCAM	TIM	PENGADMINISTRASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membentuk Tim Penyusunan Renstra/Revisi Renstra					Surat Ederan Penyusunan Renstra/Revisi Renstra	30 menit	SK Tim	SOP Penyusunan Tim
2.	Melaksanakan Koordinasi Persiapan Penyusunan Renstra/Revisi Renstra					Surat Ederan Penyusunan Renstra/Revisi Renstra ,SK Tim Penyusunan Renstra/Revisi Renstra	60 menit	Rencana Aksi	
3.	Mengumpulkan Data Dukung Penyusunan Renstra/Revisi Renstra					Rencana Aksi,Pedoman Penyusunan Renstra/Revisi Renstra	60 menit	Data Dukung Terkumpul	
4.	Menyusun Darf Renstra/Revisi Renstra			<b>*</b>		Rencana Aksi,Pedoman Penyusunan Renstra/Revisi Renstra, Data Dukung Terkumpul	7 hari Kerja	Darf Renstra/Revisi Renstra,	
5.	Mengoreksi Darf Renstra/Revisi Renstra					Pedoman Penyusunan Draf Renstra/Revisi Renstra,	1 hari Kerja	Darf Renstra/Revisi Renstra Terparaf	

6.	Mengoreksi dan Menandatangani Dokumen Renstra/Revisi Renstra	<u> </u>				Darf Renstra/Revisi Renstra Terparaf	1 hari Kerja	Renstra/Revisi Renstra	
7.	Mengarsipkan dan Mengirim Dokumen Renstra/Revisi Renstra					Renstra/Revisi Renstra	10 menit	Arsip Renstra/Revisi Renstra, Renstra/Revisi Renstra diterima oleh Bagian Organisasi	SOP Persiapan Dokumen,SOP Pengiriman Dokumen
	CAMAT PENGKADAN								

M.TABRANI,S.A.P WAS HNP.19661101 198512 1 001





### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)** 

# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN PENGKADAN

**ALAMAT : JALAN LINTAS SELATAN KM.105 MARTADANA 78759** 

EMAL: kantorcamatpengkadan@Gmail.com



#### PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN PENGKADAN

## NOMOR SOP : 100.3.6 / 12 / KEC.PKD / 2024 TANHGAL PEMBUATAN : 05 Februari 2024 TANGGAL REVISI TANGGAL EVEKTIF DI SAHKAN OLEH

* PER STATE OF THE PER
H. TABRANI, S.A.P WA SNIP. 19661101 198512 1 001

	NAMA SOP AP	: PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI UTAMA	
<ol> <li>Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> <li>Permenpan &amp; Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</li> </ol>	2.Memiliki kemampuan mengevaluasi kin     3.Mampu mengoperasikan komputer	·
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1.SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran	
2.SOP Penyusunan Renstra	2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran	
3.SOP Penyusunan LKj	Seperangkat Komputer yang dilengka	api aplikasi office (word, excell)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN	
	Dokumen Renja	

#### SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

			PELAKSANAAN						KETERANGAN		
NO	AKTIVITAS	CAMAT	SEKCAM	TIM	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	STAF	KASUBBAG UMUM DAN APARATUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memerintahkan untuk penyusunan Renja							Surat masuk	10 menit	Disposisi pada surat masuk	
2.	Membentuk Tim, memberi pengarahan							Disposisi pada surat masuk, struktur organisasi	20 menit	Disposisi pada surat masuk, struktur organisasi	
3.	Mengumpulkan bahan, merumuskan penyusunan Renja							DPA, Laporan Realisasi Anggaran	1 hari	DPA, Laporan Realisasi Anggaran	
4.	Menyusun konsep Renja							Pedoman dan Sistematika Renja	1 hari	Konsep Renja	
5.	Pengetikan konsep Dokumen Renja							Konsep Renja	1 hari	Konsep Renja	

6.	Memeriksa konsep Renja. Jika setuju, diserahkan kepada Tim. Jika tidak, diserahkan kepada staf untuk diperbaiki.		Konsep Renja	10 menit	Konsep Renja	
7.	Memeriksa konsep Renja. Jika setuju, diserahkan kepada Sekretaris. Jika tidak, diserahkan kepada kasubag untuk diperbaiki		Konsep Renja	10 menit	Konsep Renja	
8.	Memberi Paraf (telah diperiksa)		Konsep Renja	30 menit	Konsep Renja	
9.	Menandatangani Dokumen Renja		Konsep Renja	30 menit	Dokumen Renja yang sudah disahkan	
10.	Memerintahkan untuk penggandaan dan pendistribusian		Dokumen Renja yang sudah disahkan	30 menit	Dokumen Renja yang sudah disahkan	SOP Pengiriman Surat
11.	Memerintahkan staf untuk mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan		Dokumen Renja yang sudah disahkan	30 menit	Bukti Pengiriman, Iaporan	

12.	Mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan.	Dokumen Re yang sudal disahkan	nja 30 menit Bu	ıkti Pengiriman, laporan
		THITAH KA	Pengkadan,05 Februari	2024

CAMAT PENGKADAN

M.TABRANI,S.A.P MAS H NIP. 19661101 198512 1 001





### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA (PK)** 

## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN PENGKADAN

**ALAMAT : JALAN LINTAS SELATAN KM.105 MARTADANA 78759** 

EMAL: kantorcamatpengkadan@Gmail.com



#### PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN PENGKADAN

### NOMOR SOP : 100.3.6 / 14 / KEC.PKD / 2024 TANHGAL PEMBUATAN : 06 Februari 2024 TANGGAL REVISI TANGGAL EVEKTIF DI SAHKAN OLEH

H. TABRANI,S.A.P. 19661101 198512 1 001

: PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

#### NAMA SOP AP KUALIFIKASI UTAMA

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 2. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
- 3. Peraturan Daerah Kab/Kota Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
- 4. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 5. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedusukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

- 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja OPD.
- 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja OPD.
- 3. Mengetahui Penggunaan Perangkat Komputer
- 4. Mengetahui Aplikasi Komputer Penyusunan DPA

#### KETERKAITAN PERLENGKAPAN

1.SOP Rapat Internal

DASAR HUKUM

2.SOP Penyusunan Renja

- 1. Renstra
- 2. Renja
- 3. Format Perjanjian Kinerja
- 4. Perangkat Komputer Komputer/Laktop, Printer dan Kertas HVS
- 5. Jaringan Internet
- PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN
- 1.Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Perjanjian kinerja ini tidak akan berjalan lancar.
- 1.Dokumen program, kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran.

#### SOP: PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PENGKADAN

				PELAKSANAAN					
NO	AKTIVITAS	CAMAT	SEKCAM	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	STAF/JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1.	Memerintahkan penyusunan Perjanjian Kinerja.	MULAI				Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	
2.	Mengkoordinir penyusunan Perjanjian Kinerja.					Disposisi surat	10 Menit	Disposisi tugas	
3.	Membuat format pengumpulan data dan informasi Perjanjian Kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat.					Format Perjanjian kinerja	2 Jam	Format Perjanjian kinerja	
4.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Perjanjian Kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat.					Format Perjanjian kinerja	1 Jam	Draft usulan Perjanjian kinerja	
5.	Melaksanakan Rapat pembahasan Perjanjian Kinerja Bersama Kepala OPD, Pejabat Eselon III dan IV.					Draft Perjanjian Kinerja	2 Jam	Draft Perjanjian Kinerja	SOP pelaksanaan rapat
6.	Menghimpun format data dan informasi Perjanjian Kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat.					Draft Perjanjian kinerja	2 Jam	Draft Perjanjian kinerja	SOP Pengumpulan Data
7.	Menganalisis data dan informasi Perjanjian Kinerja yang telah terkumpul.					Draft Perjanjian kinerja	4 Hari	Draft Perjanjian kinerja	

8.	Membuat Konsep Perjanjian Kinerja.			<b>—</b>		Draft Perjanjian Kinerja	2 Hari	Dokumen Perjanjian kinerja	
9.	Mengoreksi Konsep Dokumen Perjanjian Kinerja.	-	1	2		Dokumen Perjanjian kinerja	1 Hari	Dokumen Perjanjian kinerja	
10.	Menyampaikan Dokumen Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari pejabat Eselon IV sampai dengan Kepala OPD untuk dimintakan persetujuan.					Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Jam	Dokumen Perjanjian Kinerja	
11.	Penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja secara berjenjang oleh pejabat Eselon IV sampai dengan Kepala OPD.	$\Diamond$				Konsep surat pengantar	10 menit	surat pengantar	
12.	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahakan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju.					Dokumen Perjanjian kinerja	15 menit	Dokumen Perjanjian kinerja	
13.	Mengantar surat, Menggandakan dan mengarsipkan Dokumen Perjanjian Kinerja.				SELESAI	Dokumen Perjanjian Kinerja	15 menit	Dokumen Perjanjian kinerja	

H.TABRANI,S.A.P







### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPA)

# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN PENGKADAN

**ALAMAT : JALAN LINTAS SELATAN KM.105 MARTADANA 78759** 

EMAL: kantorcamatpengkadan@Gmail.com



#### PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN PENGKADAN

NOMOR SOP	: 100.3.6 / 11 / KEC.PKD / 2024
TANHGAL PEMBUATAN	: 02 Februari 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EVEKTIF	
DI SAHKAN OLEH	ANAT PENOKADAN



#### NAMA SOP AP

**KUALIFIKASI UTAMA** 

#### : PENYUSUN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

#### 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kecamatan

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 4. Peraturan Daerah Kab/Kota Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
- 5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 6. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedusukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

- 1. Mengetahui Tugas dan Fungsi Penyusun Program
- 2.Mengetahui Tugas Dan Fingsi Jabatan
- 3. Memiliki Kemampuan Analisis Data, Penyusun Rencana Dan Program
- 4. Mengetahui Penggunaan Perangkat Komputer
- 5. Mengetahui Aplikasi Komputer Penyusunan DPA

#### KETERKAITAN PERLENGKAPAN PERLENGKAPAN

**SOP Rapat** 

DASAR HUKUM

SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data

- 1. Dokumen Renja
- 2. Dokumen RKAP
- 3. Komputer/Laktop, Printer dan Kertas HVS
- 4. Jaringan Internet

#### PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Penyusunan DPPA harus dilaksanakan tepat waktu, guna memperlanjar pelaksanaan kegiatan

Menjadi dasar pelaksanaan perubahan program dan kegiatan SKPD Bidang terkait memiliki copy salinan dokumen DPPA Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

### SOP : PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA) KECAMATAN PENGKADAN

				PELAKSANAAN		ı	MUTU BAKU		
NO	AKTIVITAS	CAMAT	SEKCAM	KASI/KASUBBAG	PENGADMINISTARASI UMUM	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1.	Memberikan tugas dan arahan terkait penyusunan DPPA OPD					Surat permintaan penyusunan DPPA	15 Menit	Disposisi tugas	
2.	Menindaklanjuti tugas dan arahan pimpinan dengan menugaskan Kepala Sub Bagian Perencanaan menyusun DPPA					Surat permintaan penyusunan DPPA dan disposisi tugas	15 Menit	Disposisi tugas	
3.	Menyampaikan surat permintaan DPPA dan disposisi tugas kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan					Surat permintaan penyusunan DPPA, disposisi tugas dan buku distribusi surat	15 Menit	Buku distribusi surat yang telah diparaf	
4.	Menugaskan Analis Perencanaan untuk mengkoordinasikan penyusunan DPPA kepada Kepala Seksi/Subbag serta mengumpulkan data yang Diperlukan					Surat permintaan penyusunan DPPA dan disposisi tugas	30 Menit	Disposisi tugas	
5.	Membuat dan mendistribusikan format DPPA dan fotocopy Renja kepada Kepala Seksi/Subbag terkait					Draf Dokumen Surat permintaan penyusunan DPPA dan disposisi tugas	1 Jam	Format DPPA	

6.	Menyusun draf DPPA dan menyerahkan kepada Analis Perencanaan				Format DPPA dan Fotocopy Renja Perubahan	1 Minggu	Draf DPPA bidang / sekretariat	
7.	Mengumpulkan dan mengolah draf DPPA dari Seksi/Subbag.Mengimput DPPA Ke dalam aplikasi APBD, mendownload dan mencetak draf DPPA. Menyerahkan draf DPPA kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan				Draf DPPA	1 Minggu	Draf DPPA	SOP Pengumpulan Dan pengolahan data
8.	Menyusun dan menyesuaikan draf DPPA Seksi/Subbag dan sekretariat. Memverifikasi kode rekening draf DPPA. Menyerahkan Konsep DPPA kepada Sekretaris Memeriksa			TIDAK	Draf DPPA	1 Minggu	Draf DPPA yang telah sesuai	
9.	Memeriksa konsep DPPA, jika menyetujui akan diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas, jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan untuk diperbaiki		YA		Draf DPPA yang telah sesuai	4 Jam	Draf DPPA yang telah sesuai	
10.	Menandatangani DPPA dan mengembalikan kepada Sekretaris				Draf DPPA	30 menit	Dokumen DPPA	
11.	Menugaskan Kepala Sub Bagian Perencanaanuntuk menggandakan, mendokumentasikan dan mengirimkan dokumen ke instansi terkait	Ų.	•		Dokumen DPPA	15 menit	Dokumen DPPA	

12.	Menugaskan Pengadministrasi untuk menggandakan dan mengirimkan dokumen ke instansi terkait untuk pengesahan		<b>T</b>	Dokumen DPPA	15 menit	Dokumen DPPA	
13.	Menggandakan dan mengirimkan DPPA ke BPKAD untuk pengesahan			Dokumen DPPA	15 menit	Dokumen DPPA Yang disahkan Kepala BPKAD	
14.	Menerima DPPA yang telah disahkan Kepala BPKAD, menggandakan dan memberikan stempel SKPD dan BPKAD mendokumentasikan dan mengirimkan DPPA ke pihak terkait			Dokumen DPPA	1 jam	Dokumen DPPA	SOP pengiriman surat/dokumen

CAMAT PENO:

H.TABRANI,S.A.P





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (SOP)

# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN PENGKADAN

**ALAMAT : JALAN LINTAS SELATAN KM.105 MARTADANA 78759** 

EMAL: kantorcamatpengkadan@Gmail.com



#### PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN PENGKADAN

# NOMOR SOP : 100.3.6 / 10 / KEC.PKD / 2024 TANHGAL PEMBUATAN : 03 Februari 2024 TANGGAL REVISI TANGGAL EVEKTIF DI SAHKAN OLEH

H. ABRANI,S.A.P

: PENYUSUN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

# DASAR HUKUM NAMA SOP AP KUALIFIKASI UTAMA

- 1. Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2022 Tanggal 09 Agustus 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2022 Tanggal 03 Agustus 2022 Tentang Pertanggungjabawan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023
- 1.Mengetahui Tugas dan Fungsi Penyusun Program
- 2.Mengetahui Tugas Dan Fingsi Jabatan
- 3. Mengetahui Penggunaan Perangkat Komputer
- 4. Mengetahui Aplikasi Kom[puter Penyusunan DPA

#### KETERKAITAN PERLENGKAPAN

SOP Rapat SOP Penyusunan DPA

- 1. Laporan Realisasi Anggaran
- 2. Dokumen Pelaksana Anggaran
- 3. Komputer/Laktop, Printer dan Kertas HVS
- 4. Jaringan Internet

#### PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Apabila Draf DPA Yang disampaikan tidak sesuai dengan prioritas dan aturan SHB maka draf DPA akan sering dikembalikan dan menghambat jadwal selanjutnya seperti pemcermatan oleh TAPD.

Disimpan sebagai dokumen Program Kerja Dan Kegiatan Serta DPA

#### SOP PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN

			PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
NO	AKTIVITAS	KASI/KASUBBAG	SEKCAM CAMAT		PENGADMINISTARASI UMUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Mengumpulkan Data Dukung Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran					Disposisi,RKA	30 Menit	RKA	
2.	Melaksanakan Koordinasi Persiapan Pentusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran					RKA	60 Menit	Koreksi RKA	
3.	Menyusun Draf Dokumen Pelaksanaan Anggaran		YA			Koreksi RKA	60 Menit	Draf Dokumen Pelaksana Anggaran	
4.	Mengkoreksi Draf Dokumen Kegiatan Anggaran	TIDAK	•	YA		Draf Dokumen Pelaksana Anggaran	15 Menit	Draf Dokumen Pelaksana Anggaran Terparaf	
5.	Menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran		TIDAK	•		Draf Dokumen Pelaksana Anggaran Terparaf	5 Menit	Dokumen Pelaksana Anggaran	
6.	Menggandakan dan Mengirim Dokumen Pelaksanaan Kegiatan					Dokumen Pelaksana Anggaran	10 Menit	Dokumen Pelaksana Anggaran Terkirim	Waktu Sesuai Jarak

#### SOP PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN

			PELAKSANAAN				MUTU BAKI	J	KETEDANOAN
NO	AKTIVITAS	KASI/KASUBBAG	SEKCAM	CAMAT	PENGADMINISTARASI UMUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Mengintruksikan Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran					Surat Permintaan Dokumen Pelaksana Anggaran	30 Menit	RKA	
2.	Koordinasi Pentusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran					Surat Permintaan Dokumen Pelaksana Anggaran; Disposisi	60 Menit	Koreksi RKA	
3.	Menyusun Draf Dokumen Pelaksanaan Anggaran					RKA: Bahan/Data Terkait	1 Hari Kerja	Draf Dokumen Pelaksana Anggaran	
4.	Mengkoreksi Draf Dokumen Kegiatan Anggaran	YA _		TIDAK		Draf Dokumen Pelaksana Anggaran	1 Hari Kerja	Draf Dokumen Pelaksana Anggaran Terparaf	
5.	Mengkoreksi dan Menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran	<b>\( \)</b>	TIDAK			Draf Dokumen Pelaksana Anggaran Terparaf	1 Hari Kerja	Dokumen Pelaksana Anggaran	
6.	Mengarsipkan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	YA				Dokumen Pelaksana Anggaran	10 Menit	Aesip Dokumen Pelaksana Anggaran	SOP Pengarsipan Dokumen

AMAT PENGKADAN

AN PENGKADAN

H.TABRANI,S.A.P

UAS H.N.P. 19661101 198512 1 001



#### I. LATAR BELAKANG

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengelolaan data kinerja berdasarkan pedoman pengumpulan data kinerja yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pengkadan dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

#### II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan pedoman pengumpulan Data Kinerja Kecamatan Pengkadan dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi unit kerja di Lingkungan Kecamatan Pengkadan mengenai mekanisme pengumpulan data kinerja. Adapun tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai gambaran kinerja Kecamatan Pengkadan . Data kinerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari :

- a. Indikator kinerja sasaran (Renstra Kecamatan Pengkadan 2021 2026)
- b. Indikator kinerja program dan kegiatan (Renstra Kecamatan Pengkadan 2021 2026)

#### III. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

#### IV. MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA PENGORGANISASIAN

a. Penanggungjawab : Camat Pengkadan

b. Unit Pengelola Data : Sekretaris Kecamatan

c. Unit Pelayanan Kepegawaian : Kasubag Umum dan Aparatur

d. Unit Penyusun Laporan Kinerja : Kasubag Program dan Keuangan

e. Unit Penyuplai Data : Kasi Pemerintahan

Kasi Kesejahteraan Masyarakat

Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum

Kasubag Umum dan Aparatur

Kasubag Program dan Keuangan

#### V. FORMAT PENGUMPULAN DATA KINERJA

Format Pengumpulan Data Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Target	Target	Realiasi	Keterangan
		Kinerja	Tahunan	Triwulan	Triwulan	

#### VI. PENUTUP

Pengumpulan data kinerja harus dilaksanakan oleh semua unit kerja dilingkup Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai suatu prosedur operasional standard. Apabila diperlukan pedoman ini dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

MAT PENGKADAN

H.TABRANI,S.A.P Pembina Utama Tk.I

A SNID. 19661101 198512 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN PENGKADAN

Jalan Lintas Selatan Km. 105 Menendang 78759

Nomor SOP	:	100.3.6 / 17 / KEC.PKD / 2024
Tanggal Pembuatan	:	6 Februari 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	MTAH KAR
Disahkan oleh	:	H.TABRANI,S.A.P  Pembina Utama Tingkat I  WIP. 19661101 198512 1 001
Nama SOP	:	SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

#### Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah;

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1. Camat Pengkadan
- 2. Sekretaris Kecamatan.
- 3. Para Kasi Kecamatan Pengkadan
- 4. Para Kasubbag Kecamatan Pengkadan
- 5. Para Staf Kecamatan Pengkadan

<ol> <li>Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja</li> </ol>	
Kecamatan.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Foto Copy Cascading	- ATK
2. SK Tim Sakip	- Komputer/ Laptop
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	- Printer
4. Rencana Strategis (Renstra)	- Kursi
5. Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan	- Meja
6. Rencana Kinerja Tahunan	- Filiing Kabinet
7. Perjanjian Kinerja	
8. Rencana Aksi	
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	
10. LkJIP	
Penjelasan: Bahan tersebut diperlukan sebagai pengumpulan data kinerja PNS	
Peringatan	- Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila SOP Pengumpulan data kinerja tidak diselesaikan maka kegiatan Pelaporan akan terhambat	- Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy
	-

#### FLOW CHART SOP

Flow Chart Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kineria

Flo	Flow Chart Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja										
			PELAKSA	NAAN			MUTU B	AKU			
NO	KEGIATAN	CAMAT	SEKCAM	KASI/ KASUBAG	STAF	PERSYARA TAN/ KELENGKA PAN	WAKTU	OUTPUT	KET		
1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1	Memerintahkan penyusunan LAKIIP		<b>-</b>			Nota Dinas	15 menit	Dokumen			
2	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing subbag dan seksi					Dokumen	5 menit	Dokumen			
3	Mengimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing subbag dan kasi					Dokumen	120 menit	Dokumen			
4	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang terkumpul					Dokumen	240 menit	Dokumen			
5	Membuat draft LAKIP					Dokumen	60 menit	Dokumen			
6	Mengoreksi draft LAKIP					Dokumen	30 menit	Dokumen			
7	Rapat Finalisasi LAKIP		<b>—</b>			Dokumen	120 menit	Dokumen			
8	Menyampaikan dokumen LAKIP dari Sekcam ke Camat untuk mendapatkan persetujuan					Dokumen	30 menit	Dokumen			
9	Penandagatangan dokumen LAKIP oleh Camat					Dokumen	5 menit	Dokumen			
10	Pembuatan Surat Pengantar pengiriman sekaligus penomoran					Dokumen	10 menit	Dokumen			
11	Penggandaan Dokumen Lakip dan pengarsipan					Dokumen	10 menit	Dokumen			
12	Pengiriman dokumen LAKIP					Dokumen	10 menit	Dokumen			



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN PENGKADAN

Email : kantorcamatpengkadan@gmail.com Jalan Raya Lintas Selatan Km. 105 Martadana 78759

#### KEPUTUSAN CAMAT PENGKADAN NOMOR 10 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

#### STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

#### CAMAT PENGKADAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan public sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara wajib menyusun standar pelayanan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pengkadan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Pengkadan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapkan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-undamg Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduantitas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
  Hulu Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
  Pembentukan Organisasi Perangkat
  Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50
  11. Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kapuas Hulu Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 11 12. Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN CAMAT PENGKADAN

TENTANG STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL

DI LINGKUNGAN KECAMATAN PENGKADAN

KABUPATEN KAPUAS HULU

KESATU : Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji penyelenggaraan kepada masyarakat Kecamatan

Pengkadan yang terdiri dari:

1. Standar Pelayanan Pencetakan Kartu Keluarga,

- 2. Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Ijin Keramaian,
- 3. Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Pindah antar Kecamatan,
- 4. Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Bantuan Sosial Keagamaan,
- 5. Standar Pelayanan Legalisasi Surat.

KEDUA: Standar Pelayanan pada Kecaamatan Pengkadan

sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan Camat Pengkadan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

RECAMATAN PENGKADAN

Ditetapkan di Pengkadan, pada tanggal : Februari 2024

ABUPATEN KAPUAS HULU,

As Rembina Muda Tk.I NIP. 19661101 198512 1 001

TABRANI, S.A.P

#### LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 10 TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN

KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

#### I. PENDAHULUAN

Kecamatan merupakan salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di bidang pemerintahan umum, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Camat. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kapuas Hulu Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

#### II. STANDAR PELAYANAN

a. Standar Pelayanan Pencetakan Kartu Keluarga

NAMA PERANGKAT DAERAH		KECAMATAN PENGKADAN
NO ·	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;</li> <li>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</li> <li>c. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;</li> <li>d. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kapuas</li> </ul>

		Petugas Percetakan Kartu Keluarga
		Petugas Loket Administrator Penduduk
3.	Pelayanan  Prosedur	1. Pengantar dari Desa/ Kelurahan 1 lembar (asli) 2. Kartu Keluarga Orang tua asli (1 lembar) 3. Photo copy akta nikah bagi yang sudah menikah (1 lembar, 1 rangkap) 4. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI (1 lembar) 5. Surat Keterangan dari luar negeri yang diterbitkan Disdukcapil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah (1 lembar) 6. Kartu Keluarga Lama (1 lembar) b. KK Karena Penambahan Anggota Keluarga Karena mengalami Kelahiran 1. Kartu Keluarga Lama (asli) (1 lembar) 2. Surat keterangan kelahiran dari bidan/dokter/rumah sakit (1 lembar) c. Perubahan Biodata KK yang salah/diubah 1. Kartu Keluarga Lama (asli) (1 lembar) 2. Fotocopy akta kelahiran/ surat keterangan dari dokter/kelurahan (1 lembar) 3. Fotocopy Ijazah yang dimiliki (1 lembar) 4. Fotocopy Surat Nikah/ akta perkawinan (1 lembar) PROSEDUR/ALUR PELAYANAN
2.	Degradad	Hulu Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu; e. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

		<ol> <li>Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas Loket.</li> <li>Petugas Loket menyerahkan berkas Pemohon kepada Administrator Penduduk untuk selanjutnya diperiksa dan diverifikasi, setelah berkas lengkap, di proses dan dan diparaf oleh Kasi Pemerintahan.</li> <li>Berkas yang telah proses diajukan ke disdukcapil untuk ditandatangani oleh pejabat bersangkutan kemudian diserahkan ke Petugas Loket untuk di serahkan kepada Pemohon.</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	3 (tiga) jam
	Biaya/tarif	Rp. 0,- (Gratis)/tidak dipungut bayaran.
	Produk Pelayanan	Blangko KK Baru
	Pengelolaan Pengaduan	<ol> <li>Datang langsung ke kantor Camat Pengkadan Jalan Raya Lintas Selatan Km. 105 Menendang 78759</li> <li>Email Kecamatan:         kec.pengkadan@gmail.com</li> <li>Instagram: kecamatanpengkadan</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Formulir Survey IKM</li> <li>Pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:         <ul> <li>a) Cek administrasi</li> <li>b) Cek lapangan</li> <li>c) Koordinasi internal</li> </ul> </li> <li>Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan</li> </ol>

# b. Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Keramaian

NAMA PERANGKAT		KECAMATAN PENGKADAN
	DAERAH	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;</li> <li>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04</li> </ul>

		Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan
		Administrasi Terpadu Kecamatan;
		c. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
		Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
		Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
		Kapuas Hulu;
		d. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50
		Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kapuas Hulu Kepada
		Camat di Lingkungan Kabupaten Kapuas
		Hulu;
		e. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 11
		Tahun 2016 tentang Standar Operasional
		Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu
		Kecamatan di Lingkungan Pemerintah
		Kabupaten Kapuas Hulu.
2.	Persyaratan	1. Surat Keterangan dari Desa/ Kelurahan 1
	Pelayanan	(satu) lembar (Asli)
		2. Surat Permohonan (1 lembar)
		3. Fotocopy KK/KTP Pemohon (2 lembar) 4. Nomor Induk Kesenian/yang sejenis 1
		Rangkap
		5.Fotocopy KK/KTP/Identitas Penanggungjawab
		(2 lembar)
3.	Prosedur	PROSEDUR/ALUR PELAYANAN
		Petugas Operator Layanan
		Petugas
		Layanan Camat Kasi Trantib
		Pemohon
		Keterangan bagan :
		a) Pemohon datang ke Kecamatan untuk
		menyerahkan berkas permohonan kepada
		Petugas Layanan.
		b) Berkas Pemohon diserahkan Petugas Layanan kepada Operator
		Layanan kepada Operator. c) Operator menyerahkan berkas Pemohon
1	I	operator menyerankan berkas remonon
		kepada Kasi Trantib untuk selaniutnya
		kepada Kasi Trantib untuk selanjutnya diperiksa dan diverifikasi, setelah berkas
		-

		d) Jika berkas Pemohon benar dan lengkap
		maka langsung diteruskan ke Camat untuk
		ditandatangani.
		e) Berkas yang telah proses dan
		ditandatangani Camat diserahkan ke
		Petugas Layanan untuk di serahkan kepada
		Pemohon.
4.	Waktu	1 (satu) jam
	Pelayanan	
5.	Biaya/tarif	Rp. 0,- (Gratis)/tidak dipungut bayaran.
6.	Produk	Surat Rekomendasi Izin Keramaian dari
	Pelayanan	Kecamatan
7.	Pengelolaan	1. Datang langsung ke kantor Camat
	Pengaduan	Pengkadan
		2. Jalan Raya Lintas Selatan Km. 105
		Menendang 78759 Email Kecamatan:
		kec.pengkadan@gmail.com
		3. Instagram: kecamatanpengkadan
		4. Kotak Saran
		5. Formulir Survey IKM
		6. Pengaduan melalui media tersebut diatas
		akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan
		dengan tahapan sebagai berikut :
		a) Cek administrasi
		b) Cek lapangan
		c) Koordinasi internal
		8. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan
		kondisi dan permasalahan

# c. Standar Pelayanan Surat Rekomendasi pindah antar Kecamatan

d.

NAMA PERANGKAT		KECAMATAN PENGKADAN
DAERA	AH	
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;</li> <li>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</li> <li>c. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi</li> </ul>

		Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; d. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kapuas Hulu Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu; e. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Pengantar dari Desa/     Kelurahan 1 (satu) lembar (Asli)     Fotocopy KK/KTP Pemohon (1 lembar) 1 Rangkap
3.	Prosedur	PROSEDUR/ALUR PELAYANAN
		Petugas Layanan  Petugas Layanan  Camat  Camat  Kasi PEM  Pemohon
		<ol> <li>Keterangan bagan :         <ol> <li>Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas Layanan.</li> <li>Berkas Pemohon diserahkan Petugas Layanan kepada Operator.</li> <li>Operator menyerahkan berkas Pemohon kepada Kasi PEM untuk selanjutnya diperiksa dan diverifikasi, setelah berkas lengkap, di proses dan dan diparaf.</li> <li>Jika berkas Pemohon benar dan</li> </ol> </li> </ol>

		lengkap maka langsung diteruskan ke Camat untuk ditandatangani. 5. Berkas yang telah proses dan ditandatangani Camat diserahkan ke Petugas Layanan untuk di serahkan kepada Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	1 (Satu) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Rp. 0,- (Gratis)/tidak dipungut bayaran.
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi pindah antar kecamatan dari camat
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ol> <li>Datang langsung ke kantor Camat Pengkadan</li> <li>Jalan Raya Lintas Selatan Km. 105 Menendang 78759</li> <li>Email Kecamatan:         kec.pengkadan@gmail.com</li> <li>Instagram: kecamatanpengkadan</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Formulir Survey IKM</li> <li>Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:         <ul> <li>Cek administrasi</li> <li>Cek lapangan</li> <li>Koordinasi internal</li> </ul> </li> <li>Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan</li> </ol>

# d. Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Bantuan Sosial Keagamaan

NAMA PERANGKAT	KECAMATAN PENGKADAN
DAERAH	
NO. KOMPONEN	URAIAN
1. Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

		<ul> <li>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</li> <li>c. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;</li> <li>d. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kapuas Hulu Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu;</li> <li>e. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu</li> </ul>
2.	Persyaratan	Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. 1. Proposal Organisasi 1 Rangkap
۷.	Pelayanan	1. 110posai Organisasi 1 Kangkap
3.	Prosedur	PROSEDUR/ALUR PELAYANAN
		<ol> <li>Keterangan bagan :         <ol> <li>Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas proposal kepada Petugas Layanan.</li> <li>Berkas Proposal Pemohon diserahkan Petugas Layanan kepada Operator.</li> <li>Operator menyerahkan berkas Proposal Pemohon kepada Kasi Kesra untuk selanjutnya diperiksa dan diverifikasi, setelah berkas lengkap, di proses dan dan diparaf, kemudian dibuatkan surat rekomendasi.</li> <li>Jika berkas Proposal Pemohon benar dan lengkap maka langsung diteruskan ke Camat beserta surat rekomendasi untuk ditandatangani.</li> <li>Berkas yang telah proses dan ditandatangani Camat diserahkan ke Petugas Layanan untuk di serahkan kepada Pemohon.</li> </ol> </li> </ol>
4.	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan
5.	Tarif/Biaya	Rp. 0,- (Gratis)/tidak dipungut bayaran.
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Bantuan Sosial Keagamaan dari camat
7.	Pengelolaan Pengaduan	Datang langsung ke kantor Camat     Pengkadan

2. Jalan Raya Lintas Selatan Km. 105 Menendang 78759
3. Email Kecamatan :
kec.pengkadan@gmail.com
4. Instagram: kecamatanpengkadan
5. Kotak Saran
6. Formulir Survey IKM
7. Pengaduan melalui media tersebut diatas
akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan
dengan tahapan sebagai berikut :
a. Cek administrasi
b. Cek lapangan
c. Koordinasi internal
8. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan
kondisi dan permasalahan

# e. Standar Pelayanan Legalisasi Surat

NAMA PERANGKAT		KECAMATAN PENGKADAN
DAERAH		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,
		menggantikan Peraturan
		Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
		tentang Kecamatan dan Peraturan
		Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
		tentang Kelurahan;
		b) Peraturan Menteri Dalam Negeri
		Nomor 04 Tahun 2010 Tentang
		Pedoman Pelayanan Administrasi
		Terpadu Kecamatan;
		c) Peraturan Daerah Kabupaten
		Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008
		Tentang Pembentukan Organisasi
		Perangkat Daerah Kabupaten
		Kapuas Hulu; d) Peraturan Bupati Kapuas Hulu
		Nomor 50 Tahun 2018 tentang
		pelimpahan sebagian Kewenangan
		Bupati Kapuas Hulu Kepada Camat
		di Lingkungan Kabupaten Kapuas
		Hulu; Peraturan Bupati Kapuas Hulu
		Nomor 11 Tahun 2016 tentang
		Standar Operasional Prosedur
		Pelayanan Administrasi Terpadu
		Kecamatan di Lingkungan
		Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

2.	Persyaratan	1. Dokumen asli yang ingin dilegalisir
	Pelayanan	(Asli) 1 (satu) lembar
		2. Fotocopy dokumen yang ingin
		dilegalisir 1 (satu) lembar 1
		Rangkap
4.	Prosedur	PROSEDUR/ALUR PELAYANAN
		,
		Pemohon Petugas Subbag Umum dan Aparatur
		Petugas Layanan Camat
		Keterangan bagan :
		1. Pemohon datang ke Kecamatan
		untuk menyerahkan berkas kepada
		Petugas Layanan. Pemohon Pemohon Petugas Layanan subbag
		Umum dan Aparatur Camat
		Petugas layanan
		2. Berkas Pemohon diserahkan
		Petugas Layanan kepada
		Subbagian Umum dan Aparatur.
		3. Subbagian Umum dan Aparatur
		menyerahkan berkas Pemohon
		kepada Camat untuk selanjutnya
		ditandatangani dan distempel.
		4. Berkas yang telah proses dan
		ditandatangani Camat diserahkan
		ke Petugas Layanan untuk di
		serahkan kepada Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	1 (Satu) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Rp. 0,- (Gratis)/tidak dipungut
		bayaran.
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi pindah antar
		kecamatan dari camat
7.	Pengelolaan	1. Datang langsung ke kantor Camat
	Pengaduan	Pengkadan
		2. Jalan Raya Lintas Selatan Km. 105
		Menendang 78759
		3. Email Kecamatan :
		kec.pengkadan@gmail.com
		4. Instagram: kecamatanpengkadan 5. Kotak Saran
		6. Formulir Survey IKM
		7. Pengaduan melalui media tersebut
		diatas akan ditindaklanjuti oleh
		tim pengaduan dengan tahapan
		sebagai berikut :
		sevagai verinat.

a. Cek administrasi
b. Cek lapangan
c. Koordinasi internal
8. Penyelesaian pengaduan sesuai
dengan kondisi dan permasalahan

Ditetapkan di Pengkadan, pada tanggal : Februari 2024

CAMAT PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU,

PENGKADAN PENGKADAN H. TABRANI, S.A.P
Pembina Muda Tk.I
PPH9661101 198512 1 001